

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA SDN DI KECAMATAN LEMBEAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA

MEFRY YULIO PANDOH

PATAR RUMAPEA

MARTHA OGOTAN

**ABSTRACT:** *In accordance with the mandate of the Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945 in Article 31 paragraph (1), mandated by the government to provide public access to education in order to develop their potential to the fullest Then the government adopted a program of policy implementation School Operational Assistance (BOS). However, implementation is still encountered some problems and obstacles.*

*The purpose of this study wanted to know how the implementation of school policies Operational assistance (BOS) on SDN in the district of East Lembean Minahasa regency. This study used qualitative methods. Study focused on the type of benefits that will be generated, (who) implementing the program, the resources deployed, as well as power, interests and strategies of the actors involved. Source of data / informants interviewed as many as 15 people consisting of 3 people Principal, 3 BOS Treasurer, 3 school committee, 3 person staff of teachers, and 3 parents and process data collection using interview techniques.*

*The results showed that: the views of the benefits generated is good. But that is not optimal in terms of delay time distribution of aid, the lack of coordination between implementers in this case BOS Management Team School with Parents and less transparency. Recommendations advice to the government in this case BOS Management Team can perform tasks in accordance with the technical guidelines already established, more committed and consistent in carrying out programs or activities, as well as more transparent and involve stakeholders in the implementation of this policy BOS.*

**Keywords:** *School Operational Assistance Policy Implementation*

## PENDAHULUAN

Kemajuan pembangunan suatu bangsa adalah salah satu indikator tingkat pencapaian pembangunan Sumber Daya Manusianya. Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan jembatan bagi suatu bangsa untuk meningkatkan daya saing secara global dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam suatu bangsa, maka diperlukan perhatian yang besar untuk dapat memberikan akses yang memadai bagi tiap-tiap

warga negara dalam proses peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar dalam pembangunan manusia suatu bangsa, hal ini dikarenakan pendidikan merupakan jalan bagi masyarakat untuk dapat mengakses lebih jauh sektor pendidikan. Pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi dalam suatu negara tentunya harus memberikan akses yang dapat dijangkau dengan mudah bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

Pasal 31 ayat (1), diamanatkan pada pemerintah untuk dapat memberikan akses pada masyarakat untuk mengenyam pendidikan guna mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 memberikan penjelasan bahwa pendidikan merupakan hak yang harus dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya pada golongan ekonomi kuat, namun juga golongan ekonomi lemah. Sektor pendidikan bagi negara maju merupakan hal yang sangat penting dikarenakan oleh kenyataan bahwa dengan pendidikan yang baik maka Sumber Daya Manusia dalam suatu bangsa dapat lebih bersaing dalam berbagai kondisi termasuk dalam penguasaan teknologi. Dengan penguasaan teknologi yang baik diharapkan dapat menambah produktifitas Sumber Daya Manusia yang ada dalam suatu bangsa.

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas, produktif, dan berakhlak mulia. Komitmen yang kuat dari pemerintah pada tingkat pusat maupun daerah dibutuhkan agar visi pendidikan nasional dapat terwujud. Guna menyokong terwujudnya

visi tersebut, maka pendidikan nasional melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional memiliki misi yang harus dilaksanakan sebaik mungkin yaitu : (1) menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar, (2) mewujudkan system pendidikan efektif, efisien dan bertanggung jawab (3) mewujudkan pendidikan nasional yang merata dan bermutu. Peran institusi pemerintah dalam melalui Kementerian Pendidikan Nasional mutlak diperlukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi pendidikan nasional.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pendidikan nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah perbaikan terhadap tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah. Permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan secara terpisah, namun harus secara menyeluruh dan berkesinambungan. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan tersebut khususnya dalam hal alokasi anggaran sektor pendidikan dengan tujuan dan harapan dapat menunjang terwujudnya visi dan misi pendidikan nasional.

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui

peningkatan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, dimana menurut Abdulwahab (1990:125) keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN Di Kecamatan Lembean Timur belum berjalan dengan baik, dimana sejak tahun 2004 s/d 2013 kebijakan ini masih terus berjalan serta proses penyaluran anggaran masih tetap berlangsung tetapi masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang jenis manfaat yang akan dihasilkan di SDN di Kecamatan Lembean Timur belum memberikan hasil yang baik. Hal tersebut memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi baik itu kendala yang dihadapi oleh pendamping pelaksana, serta kendala yang dihadapi oleh dinas teknis maupun masalah waktu pelaksanaan dalam proses implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah harus memiliki strategi yang bijaksana agar dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Raksasata (Lubis 2007:7) bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas pendidikan bagi sekolah khususnya yang menerima dana BOS, lewat implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah sampai saat ini masih membutuhkan bantuan agar supaya program ini masih tetap berjalan dan kiranya pemerintah pusat mengenai pengalokasian dana yang dialokasikan dalam implementasi kebijakan masih terbatas. Menurut Jones (Suradinata 1994:44) aktivitas fungsional dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari aktor atau badan yang berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan pada peranan birokrasi, dan berdasarkan hasil penelitian

bahwa peran pemerintah baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berperan serta dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan BOS ini sudah maksimal namun perlu pengawasan yang lebih khususnya sekolah-sekolah penerima BOS karena sering terjadi kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak sekolah terkait penyaluran dana BOS . Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang Pelaksana kebijakan Pada SDN di Kec. Lembean Timur telah memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BOS yaitu keterlambatan waktu dalam penyaluran dan kurangnya koordinasi anantara tim manajemen daerah dan sekolah maupun dengan tim manajemen sekolah dengan staf guru dan orang tua murid. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang Pelaksana kebijakan Pada SDN di Kec. Lembean Timur belum memberikan hasil yang baik.

Hal ini disebabkan karena kondisi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa masi sangat terbatas sehingga menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat sehingga dana di ambil dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) dalam menunjang dan meningkatkan kualitas

pendidikan. . Menurut Chandler dan Plano (Pasolong 2007:38) bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Hal itu dimaksudkan bahwa pemerintah harus memanfaatkan serta mengelolah sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ada anggaran yang bisa digunakan untuk melancarkan kebijakan yang akan dijalankan.

Berdasarkan latar belakang penulisan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Pada SDN Di Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 taahun dalam hal ini SDN Di Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah

raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakat (Gunawan 2013:80)

Penelitian kualitatif menurut Flick (Gunawan, 2013:8) adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.

Penelitian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alami. Data dan informasi lapangan ditarik maknanya dan konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses terjadinya suatu peristiwa dalam situasi alami (Gunawan 2013:88). Dengan menggunakan metode ini peneliti ingin melihat bagaimana proses Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Negeri Di Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa.

### **Fokus Penelitian Dan Defenisi Konsepsional**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa. Untuk menilai keberhasilan yang mencakup 4 kriteria yaitu; Sosialisasi Program BOS, Proses Penyaluran Dana, Ketepatan Waktu dan Sasaran, serta Pencapaian Tujuan.

Untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut, maka akan digunakan konsep yang dikemukakan oleh Grindle, maka hal-hal yang perlu diteliti adalah (1) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (2) (siapa) pelaksana program, (3) sumber daya yang dikerahkan, (4) kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat.

### **Sumber Data Penelitian (*Informan*)**

Penelitian ini dilaksanakan di 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) di wilayah kecamatan lembean timur yang di ambil secara random, yaitu SD Inpres Seretan, SD Negeri Watulaney, dan SD Inpres Kayuroya.

Salah satu sifat dari penelitian kualitatif ialah tidak terlalu mementingkan jumlah informan/responden, tetapi lebih mementingkan content, relevansi, sumber yang dapat memberrikan informasi, baik mengenai orang, peristiwa, atau hal. Oleh karena itu teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini ialah teknik *purposive* atau pengambilan informan bertujuan.

Sumber data (informan) dalam penelitian ini diambil dari berbagai unsur yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah: unsur Kepala Sekolah yang menjadi penanggungjawab, unsur anggota yaitu Bendahara BOS sekolah, unsur Komite sekolah dan unsur orang tua siswa sebagai tokoh masyarakat yang anaknya bersekolah di sekolah tersebut.

Adapun rincian informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah : 3 orang.
- b. Bendahara BOS : 3 orang.
- c. Komite Sekolah : 3 orang.
- d. Staf Guru : 3 orang
- e. Orang Tua Murid : 3 orang

Dengan demikian jumlah seluruh informan dalam penelitian ini adalah 15 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian nanti, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui:

1. Menggunakan wawancara  
Adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. (Pasolong 2012:137)
2. Menggunakan observasi  
Adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti. (Pasolong 2012:131)
3. Menggunakan studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian.(Nazir 1998:112)

### **Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Gunawan, 2013:210) menyatakan bahwa analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan, kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Adapun langkah-langkah dalam analisis data menurut Kinclom dan Guba (dalam Moleong 2007:112) sebagai berikut :

1. Data Reduksi  
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data (kasar) yang ada dalam *Fieldnote (catatan lapangan)*. Proses reduksi data adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada proses penulisan laporan akhir selesai dilakukan.
2. Sajian data

Pada tahapan penyajian data penulis mengelompokkan data berdasarkan kelompok informan berdasarkan pokok masalah dan sumber (informan).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Dalam pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia teliti dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pertanyaan-pertanyaan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proposisi sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

## Profil Sekolah Yang Menjadi Tempat Penelitian

### SD Negeri Watulaney

Sekolah Dasar (SD) Negeri Watulaney berdiri pada tahun 1968, dan beroperasi pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1968. Kepemilikan tanah oleh pemerintah, dan statusnya adalah milik pemerintah dengan NSS : 101170206004, NPSN: 40100801 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Lembean Timur Desa Watulaney dengan kode pos 9568

#### Data Guru

- 1) Johnfry H. Keloay, S.Pd Kepala Sekolah
- 2) Thelma tangilingas Guru / Bendahara Sekolah

- 3) Norma S. Tulangi Guru
- 4) Meily M. Korengkeng Guru
- 5) Elfie M. Panambunan Guru
- 6) Selfie M. Kawilarang Guru
- 7) J. Korengkeng Komite Sekolah

### SD Inpres Kayuroya

Sekolah Dasar (SD) Inpres Kayuroya berdiri pada tahun 1983, dan beroperasi pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1968. Kepemilikan tanah oleh pemerintah, dan statusnya adalah milik pemerintah dengan NSS : 101170205011, lokasi sekolah berada di Jaga II Desa Kayuroya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pagi hingga siang hari, bangunan sekolah berbentuk semi permanen dengan luas sekolah  $7 \times 7 \times 7 = 343$  m<sup>2</sup>, berada di Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Lembean Timur Desa Watulaney dengan kode pos 95683.

#### Data Guru

- 1) Mariani Warembung, S.Pd Kepala Sekolah
- 2) Meity Pandoh Guru / Bendahara Sekolah
- 3) Novry Lompoliuw Guru / Orang Tua
- 4) Temy Watulingas Guru

5) Rocky Rumambi Komite Sekolah

## 2. SD Inpres Seretan

Sekolah Dasar (SD) Inpres Seretan berdiri pada tahun 1979, dan beroperasi pada tahun yang sama yaitu pada tahun 1979. Kepemilikan tanah oleh sekolah, dan statusnya adalah milik sendiri dengan NSS : 101170206002, NPSN: 40101198 Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Minahasa Kecamatan Lembean Timur Desa Seretan dengan kode pos 95683.

## PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs serta satuan pendidikan yang sederajat).

Untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan, dimana menurut Abdulwahab (1990:125) keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuan secara nyata dalam meneruskan/mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN Di Kecamatan Lembean Timur belum berjalan dengan baik, dimana sejak tahun 2004 s/d 2013 kebijakan ini masih terus berjalan serta proses penyaluran anggaran masih tetap berlangsung tetapi masih terdapat kendala-kendala yang mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang jenis manfaat yang akan dihasilkan di SDN di Kecamatan Lembean Timur belum memberikan hasil yang baik. Hal tersebut memberikan sedikit pemahaman bahwa dalam mengatasi berbagai macam kendala yang terjadi baik itu kendala yang dihadapi oleh pendamping pelaksana, serta kendala yang dihadapi oleh dinas teknis maupun masalah waktu pelaksanaan dalam proses implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pemerintah harus memiliki strategi yang bijaksana agar dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Raksasata (Lubis 2007:7) bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas pendidikan bagi sekolah khususnya yang menerima dana BOS, lewat implementasi kebijakan Bantuan Operasional

Sekolah sampai saat ini masih membutuhkan bantuan agar supaya program ini masih tetap berjalan dan kiranya pemerintah pusat mengenai pengalokasian dana yang dialokasikan dalam implementasi kebijakan masih terbatas. Menurut Jones (Suradinata 1994:44) aktivitas fungsional dari sudut pandang organisasi dapat dilihat dari aktor atau badan yang berperan dalam implementasi program dengan memfokuskan pada peranan birokrasi, dan berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintah baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah berperan serta dalam memfasilitasi pelaksanaan kebijakan BOS ini sudah maksimal namun perlu pengawasan yang lebih khususnya sekolah-sekolah penerima BOS karena sering terjadi kesalahpahaman atau kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak sekolah terkait penyaluran dana BOS. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle tentang Pelaksanaan kebijakan Pada SDN di Kec. Lembean Timur telah memberikan hasil yang baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BOS yaitu keterlambatan waktu dalam penyaluran dan kurangnya koordinasi antara tim manajemen daerah dan sekolah maupun dengan tim manajemen sekolah dengan staf guru dan orang tua murid. Hal itu membuktikan bahwa tingkat keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle

tentang Pelaksanaan kebijakan Pada SDN di Kec. Lembean Timur belum memberikan hasil yang baik.

Hal ini disebabkan karena kondisi pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa masih sangat terbatas sehingga menyebabkan ketergantungan pada pemerintah pusat sehingga dana di ambil dari APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) dalam menunjang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Chandler dan Plano (Pasolong 2007:38) bahwa pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau masalah pemerintah. Hal itu dimaksudkan bahwa pemerintah harus memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ada anggaran yang bisa digunakan untuk melancarkan kebijakan yang akan dijalankan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan diatas, implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN Di Kec. Lembean Timur, yang berorientasi pada sekolah penerima bantuan dapatlah ditarik kesimpulan sesuai fokus penelitian sebagai berikut:

Implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN di Kecamatan

Lembean Timur Kabupaten Minahasa, pada umumnya belum efektif jika dilihat dari empat aspek penting dari proses implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Grindle, yakni dari aspek

1. Jenis manfaat yang akan dihasilkan; bantuan tentang peningkatan kualitas pendidikan bagi sekolah penerima bantuan belum berjalan dengan baik, karena masih mengalami keterlambatan waktu dan kurangnya koordinasi namun program ini sudah baik.
2. (siapa) pelaksana program; kinerjanya sudah maksimal, kerja sama antara tim manajemen BOS daerah dan tim manajemen Bos sekolah sudah baik, namun masih butuh banyak pengawasan dari pemerintah daerah untuk mengawasi langsung pelaksanaan di sekolah-sekolah penerima BOS karena sering tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. sumber daya yang dikerahkan; dilihat dari aspek kapabilitas dan tenaga kerja dalam penyelenggaraan program ini, semuanya belum berjalan dengan baik karena tim manajemen BOS belum bisa mengatasi masalah keterlambatan waktu dan kurangnya koordinasi dalam melaksanakan tugas tetapi anggaran yang di salurkan sudah bisa mencukupi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah penerima BOS.

4. Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Aktor Yang Terlibat; di lihat dari aspek peran pemerintah, kewenangan dari pelaksana program, menunjukkan bahwa semuanya sudah baik dan metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini selalu berdasarkan mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan dan konsisten.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SDN di Kec. Lembean Timur Kab. Minahasa, jika dilihat dari aspek jenis manfaat yang akan dihasilkan, (siapa) pelaksana program, sumber daya yang dikerahkan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat secara umum dalam pelaksanaan program bantuan lanjut usia belum sepenuhnya berjalan dengan baik, untuk itu dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penyaluran Dana BOS ini, sebaiknya pemerintah daerah dalam hal ini Tim Manajemen BOS daerah langsung saja membagikan bantuan kepada sekolah yang menerima, dan langsung saja memberikan pertanggungjawaban anggaran serta teknis penggunaann anggaran seperti apa, agar tidak terjadi penyelewengan dan tetap terkontrol.
2. Menyangkut kinerja para pelaksana lebih baik mengikuti petunjuk teknis yang ada

dan berkomitmen dan konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan dalam mengimplementasikan kebijakan BOS ini.

3. Dalam mengatasi permasalahan keterlambatan waktu tim manajemen BOS daerah harus lebih bekerja sama dengan pihak Bank sehingga proses penyaluran dana bisa tepat waktunya dan proses pembagiannya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Menyangkut kurangnya koordinasi tim manajemen BOS dengan pihak staf guru dan orang tua murid agar supaya lebih dilibatkan lagi dalam pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh dana BOS memanggil mereka saat rapat jangan hanya mengsosialisasikan kegiatan hanya lewat papan informasi.
4. Untuk meringankan pemerintah dalam implementasi kebijakan BOS, langkah baiknya pemerintah menyediakan tempat atau sarana dan prasarana khusus bagi sekolah yang perlu dibantu agar dalam penyaluran lebih terfokus dan tepat sasaran dalam memberikan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, S., 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Achlis. 1986. *Pekerjaan Sosial Sebagai Profesi dan Proses Pertolongan*, : Kopma STKS Bandung, Bandung
- Fariad, Andi, dan Sastro, 2012, *Studi Analisa Kebijakan*, Refika Aditama, Makasar.
- Gunawan, I, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktek)*, Bumi Aksara, Malang.
- Islamy, I, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta..
- Lubis, M. S., 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- Sunisi, M., 2008, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Lanjut Usia*, Jakarta
- Soetrisno, H, 1999, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas
- Moleong, L, J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Karya, Bandung
- Muhidin, S. 1982. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial*, Bandung.
- Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Rineka Cipta , Jakarta.
- Nugroho, R, 2012 , *Public Policy*. Edisi keempat, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, ALFABETA, cv, Makassar.
- Pasolong, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, ALFABETA, cv, Bandung.
- Santosa, P, 2008, *Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi Good Governance)*, Refrika Aditama, Bandung.
- Siporin, M. 1975. *Introduction to Social Work Practice*. New York : MacMillan Pub Co.
- Sunusi, M, 2008, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)*, Jakarta.

Sumarnonugroho, T, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, PT. Handinita, Yogyakarta, 1991.

Suradinata, E, 1994, *Organisasi dan Manajemen Pemerintahan*, Ramdhan, Bandung.

Syafiie, I. K, 1997, *Ilmu Administrasi Publik*. Edisi Revisi, RINEKA CIPTA, Jakarta.

Wibowo, 2003, *Statistika Penelitian*, alfabeta, Bandung

Tachjan.2008.*Implementasi kebijakan publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi).

*Sumber Lain:*

*Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional*. 2012. Bandung: Nusa Aulia.

*Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertangunjawaban Keuangan Dana Bantuan Oprasional Sekolah Tahun 2013*.

<http://artikelpolitik.UGM.Bastian Widyatama.2006>

[http// Howlett, Michael dan Ramesh, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Toronto: Oxford University Press.](http://Howlett, Michael dan Ramesh, 1995, Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem, Toronto: Oxford University Press.)